

## BAB 1

### PENDAHULUAN

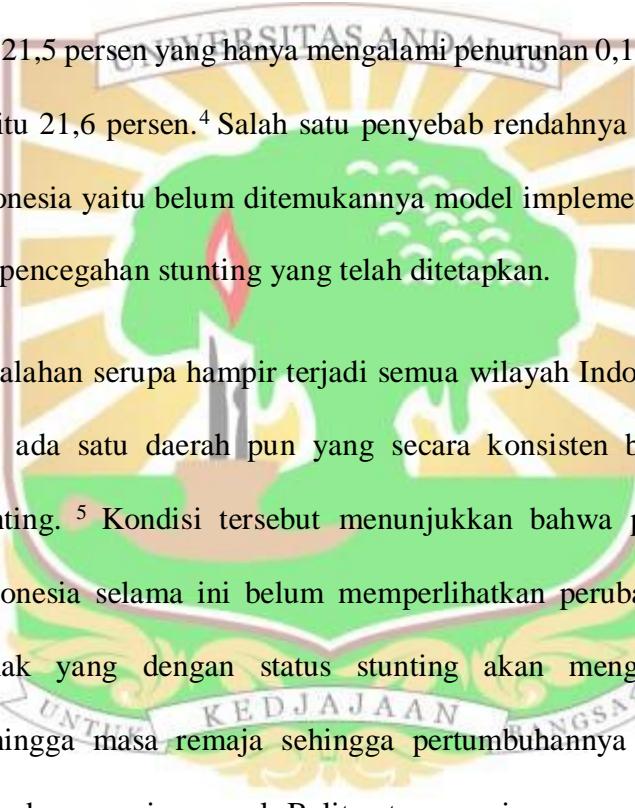
#### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan pada dasarnya memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas manusia sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Maka dari itu salah satu pilar pembangunan Indonesia adalah di bidang kesehatan melalui pemenuhan kecukupan gizi masyarakat. Sebagaimana yang kita ketahui masalah gizi merupakan permasalahan kompleks dan penting dalam siklus kehidupan yang perlu ditangani oleh pemerintah secara cepat dan tepat baik itu pada bayi, anak kecil, remaja, bahkan lansia. Salah satu masalah kesehatan yang berkaitan dengan gizi adalah stunting. Stunting dapat didefinisikan sebagai kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang tinggi badannya lebih pendek dibandingkan tinggi badan anak seusianya akibat kekurangan gizi. Menurut Kemenkes tahun 2018 stunting merupakan masalah gizi kronis pada balita yang ditandai dengan tinggi badan yang lebih pendek dibandingkan dengan anak seusianya dan anak yang menderita stunting ini lebih rentan terkena penyakit ketika beranjak dewasa.<sup>1</sup>

Pada tahun 2020 balita yang mengalami stunting di dunia mencapai 22% atau sekitar 149,8 juta. Angka ini sudah mengalami penurunan jika dibandingkan pada tahun 2000 silam yang mencapai 32,6% dan 22,8% pada tahun 2017. Komposisi terbesar balita yang mengalami stunting berasal dari Benua Afrika

---

<sup>1</sup> Dwipa Anwara Veony dkk, “Efektivitas Media Booklet Terhadap Peningkatan Pengetahuan dan Sikap Ibu Balita dalam Pencegahan Risiko Stunting”, Jurnal Promosi Kesehatan Mandiri, (Oktober, 2023), 28.



31,7%, disusul dengan Asia 30,1% dan Mediterania Timur 26,2%.<sup>2</sup> Berdasarkan data WHO pada tahun 2021, Indonesia menjadi salah satu negara dengan prevalensi stunting tertinggi di regional Asia Tenggara/ *South-East Asia Regional* (SEAR) dengan rata-rata prevalensi balita stunting di Indonesia sebesar 31,8%.<sup>3</sup> Sedangkan berdasarkan data Kementerian Kesehatan, angka stunting di Indonesia pada tahun 2023 mencapai 21,5 persen yang hanya mengalami penurunan 0,1 persen dari tahun sebelumnya yaitu 21,6 persen.<sup>4</sup> Salah satu penyebab rendahnya penurunan angka stunting di Indonesia yaitu belum ditemukannya model implementasi yang efektif untuk program pencegahan stunting yang telah ditetapkan.

Permasalahan serupa hampir terjadi semua wilayah Indonesia dan sampai saat ini belum ada satu daerah pun yang secara konsisten berhasil menekan prevalensi stunting.<sup>5</sup> Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penurunan angka stunting di Indonesia selama ini belum memperlihatkan perubahan yang cukup signifikan. Anak yang dengan status stunting akan mengalami gangguan pertumbuhan hingga masa remaja sehingga pertumbuhannya cenderung lebih rendah dibandingkan remaja normal. Balita atau remaja yang mengalami stunting berisiko mendapatkan penyakit kronik salah satunya adalah obesitas. Remaja stunting memiliki resiko obesitas dua kali lebih tinggi dari pada remaja yang tinggi

---

<sup>2</sup> Loc.cit

<sup>3</sup> WHO, World Health Statistic 2021. Diakses pada tanggal 1 Oktober 2024

<sup>4</sup> Dinkes Papua, *Menkes Budi Soroti Lambatnya Penurunan Angka Stunting di Indonesia*, <https://e-ppid.bkkbn.go.id/agenda/show/pemerintah-targetkan-angka-prevalensi-stunting-di-bawah-14-persen-pada-2024-d902400fb7> diakses pada tanggal 30 September 2024

<sup>5</sup> loc.cit

badannya normal. Obesitas disebabkan oleh faktor lingkungan terutama terjadi melalui ketidakseimbangan antara pola makan, perilaku makan dan aktivitas fisik.

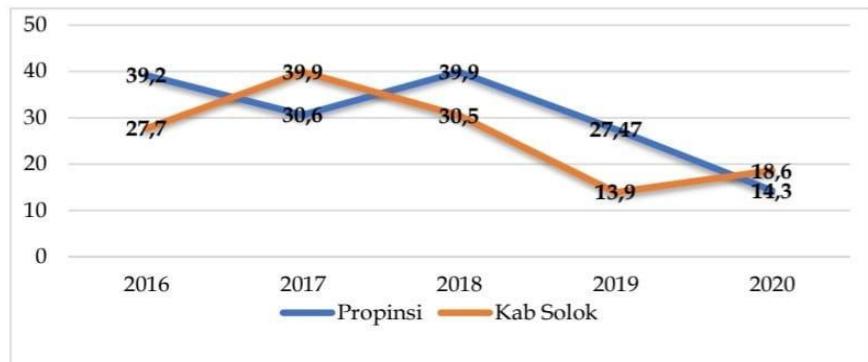
Provinsi Sumatera Barat berada pada urutan ke-17 dari 34 provinsi stunting di Indonesia dengan prevalensi balita (usia 24-59 bulan) stunting sebesar 36,2% lebih tinggi dari prevalensi nasional yaitu 35,3%. Prevalensi stunting ini meningkat dikarenakan beberapa faktor penyebab stunting yang tidak diperhatikan. Peranan dari keluarga atau pola asuh dari ibu sangat penting dalam pertumbuhan anak, hal tersebut juga berhubungan dengan sikap dan pengetahuan ibu tentang bagaimana pola gizi yang baik untuk pertumbuhan anaknya. Selain itu sanitasi lingkungan yang kurang baik memiliki resiko yang tinggi terhadap penyebab terjadinya stunting.<sup>6</sup> Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar pada tahun 2019, Kabupaten Solok ditetapkan sebagai lokus stunting di Sumatera Barat. Kabupaten Solok menempati urutan ketiga sebagai penderita stunting terbanyak di Sumatera Barat, setelah Pasaman dan Pasaman Barat.<sup>7</sup> Hasil riset tersebut relevan dengan apa yang dituliskan dalam RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2021-2026 bahwa Kabupaten Solok berada di atas batas toleransi stunting suatu wilayah menurut WHO sebesar 20 persen. Akan tetapi jika dibandingkan dengan prevalensi Sumatera Barat pada tahun tersebut, Kabupaten Solok masih berada di bawah prevalensi Sumatera Barat.

---

<sup>6</sup> Jessyca Azzahra, “ Implementasi Kebijakan 5 Pilar Penurunan Stunting dan Faktor yang Mempengaruhinya Di Nagari Paninggaan Kabupaten Solok”, Journal Of Policy, Governance, Development and Empowerment, 9.

<sup>7</sup> Loc.cit

**Gambar 1.1 Grafik perbandingan stunting antar provinsi dan Kabupaten Solok Tahun 2016-2020**



Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Solok Tahun 2021

*Sumber: RPJMD Kabupaten Solok 2021-2026*

Pemaparan data di atas berlanjut dengan hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) pada tahun 2021, angka prevalensi stunting di Kabupaten Solok masih berada di angka 40,1 persen. Kemudian mengalami penurunan menjadi 24,2 persen pada tahun 2022. Pada tahun 2023 angka stunting hanya 12,11 persen. Penurunan angka stunting tersebut tergolong fantastis karena jauh melebihi target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok tahun 2021-2026.<sup>8</sup> Data prevalensi stunting di Sumatera Barat tahun 2021 pada Tabel 1.1 di bawah ini:

**Tabel 1.1 Angka Prevalensi Stunting di Sumatera Barat Tahun 2021**

No	Kabupaten/Kota	Angka Prevalensi Stunting
1	Kabupaten Solok	40,1%

<sup>8</sup> Rahmatul Llila, *Kiat Pemkab Solok Turunkan Cepat Kasus Stunting*, <https://www.antaranews.com/berita/4225027/kiat-pemkab-solok-turunkan-cepat-kasusstunting>. Diakses pada tanggal 1 Oktober 2024

2	Kabupaten Pasaman	30,2%
3	Kabupaten Sijunjung	30,1 %
4	Kabupaten Padang Pariaman	28,3%
5	Kabupaten Lima Puluh Kota	28,2%
6	Kabupaten Mentawai	27,3%
7	Kabupaten Pesisir Selatan	25,2%
8	Kabupaten Solok Selatan	24,5%
9	Kabupaten Pasaman Barat	24%
10	Kabupaten Tanah Datar	21,5%
11	Kabupaten Sawahlunto	21,1%
12	Kabupaten Pariaman	20,3%
13	Kota Payakumbuh	20%
14	Kota Padang Panjang	20%
15	Kabupaten Dharmasraya	19,5%
16	Kabupaten Agam	19%
17	Kota Bukittinggi	19%
18	Kota Padang	18,9%
19	Kota Solok	18,5%

Sumber: Website Databoks, 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa Kabupaten Solok menduduki posisi tertinggi kasus stunting di Sumatera Barat. Akan Tetapi, pada

tahun 2022 pemerintah Kabupaten Solok berhasil menurunkan angka stunting dengan signifikan, dari 40,1 persen menjadi 24,2 persen pada tahun 2022. Penurunan terjadi sebesar 15,9 persen. Penurunan signifikan ini menjadikan Kabupaten Solok mendapat predikat terbaik penanganan stunting di Sumatera Barat.

Adapun salah satu daerah sebagai penyumbang angka stunting tertinggi di Kabupaten Solok adalah Kecamatan Sungai Lasi. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Kepala Bapelitbang Kabupaten Solok bahwa Kecamatan IX Koto Sungai Lasi sebagai penyumbang angka stunting tertinggi di Kabupaten Solok mencapai 23,19 persen sedangkan daerah dengan angka stunting terendah yaitu Kecamatan Pantai Cermin dengan angka stunting 5,31 persen.<sup>9</sup> Berikut data terkait tingginya angka stunting di Kecamatan IX Koto Sungai Lasi dari tahun 2019 sampai 2024 pada tabel 1.2 di bawah ini:

**Tabel 1. 2 Angka Stunting di Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Tahun 2019-2024**

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Stunting	161 orang (23,5%)	190 orang (25,1%)	191 orang (25%)	167 orang (23,1%)	132 orang 18,1%	97 orang 15,2%

*Sumber: Puskesmas Sungai Lasi, 2024*

---

<sup>9</sup> Pemerintah Daerah Kabupaten Solok, Kepala BKKBN Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, Fatmawati Apresiasi Penurunan Stunting di Kabupaten Solok Tahun 2022.

<https://infopublik.solokkab.go.id/kepala-bkkbn-perwakilan-provinsi-sumatera-barat-fatmawati-apresiasi-penurunan-stunting-di-kabupaten-> Diakses 2 Oktober 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat angka stunting dari tahun 2019 sampai 2024 di Kecamatan IX Koto Sungai Lasi mengalami naik turun. Pada tahun 2019 sampai 2021 itu meningkat sedangkan pada tahun 2022 sampai 2024 mengalami penurunan. Sedangkan puncak penurunan angka stunting yang paling tinggi yaitu pada tahun 2024 dengan prevalensi 15,2%. Meskipun telah mengalami penurunan yang drastis pada tahun 2024, Kecamatan IX Koto Sungai Lasi masih menjadi penyumbang angka stunting tertinggi di Kabupaten Solok. Hal ini dibuktikan dengan pemaparan data terkait angka stunting di setiap kecamatan, Kabupaten Solok pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1.3 Angka Stunting di Setiap Kecamatan Kabupaten Solok**

No	Kecamatan	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)
1.	IX Koto Sungai Lasi	<b>23,19</b>	<b>18,1</b>	<b>15,2</b>
2.	IX Koto di Atas	20,11	14,8	15,1
3.	IX Koto Singkarak	16,92	13,4	11,4
4.	Bukit Sundi	18,56	14,1	15,7
5.	Danau Kembar	17,15	14,1	11,85
6.	Gunung Talang	14,8	11,4	8,8
7.	Hiliran Gumanti	22,23	14,9	9,8
8.	Lembah Gumanti	14,10	9,4	9,5

9.	Lembang Jaya	19,65	13,4	14,8
10.	Kubung	13,06	10,7	11,81
11.	Junjung Sirih	15,76	13,0	13,05
12.	Pantai Cermin	5,31	11,7	15,1
13.	Payung Sekaki	21,25	12,9	12,5
14.	Tigo Lurah	12,71	12,2	10,76

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Solok, 2022-2024

Berdasarkan pemaparan data di atas dapat diketahui bahwa Kecamatan IX Koto Sungai Lasi menduduki posisi tertinggi stunting pada tahun 2022 dan 2023. Akan tetapi pada tahun 2024 Kecamatan Sungai Lasi berada pada posisi angka stunting tertinggi nomor dua di bawah Kecamatan Bukit Sundi sebagai angka stunting tertinggi di Kabupaten Solok tahun 2024. Meskipun telah mengalami penurunan yang signifikan, angka stunting di Kecamatan IX Koto Sungai Lasi masih tergolong tinggi dibandingkan kecamatan lain yang ada di Kabupaten Solok.

Tinggi nya angka stunting di Kecamatan IX Koto Sungai Lasi disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah kesadaran masyarakat yang masih rendah untuk membawa anaknya ke posyandu, kondisi tersebut juga didukung oleh hasil wawancara peneliti dengan salah satu pegawai Puskesmas Sungai Lasi menyatakan bahwa rendahnya kesadaran masyarakat membawa bayinya ke posyandu

dikarenakan akses yang terlalu jauh dan beberapa masyarakat beralasan tidak bisa meninggalkan pekerjaannya.

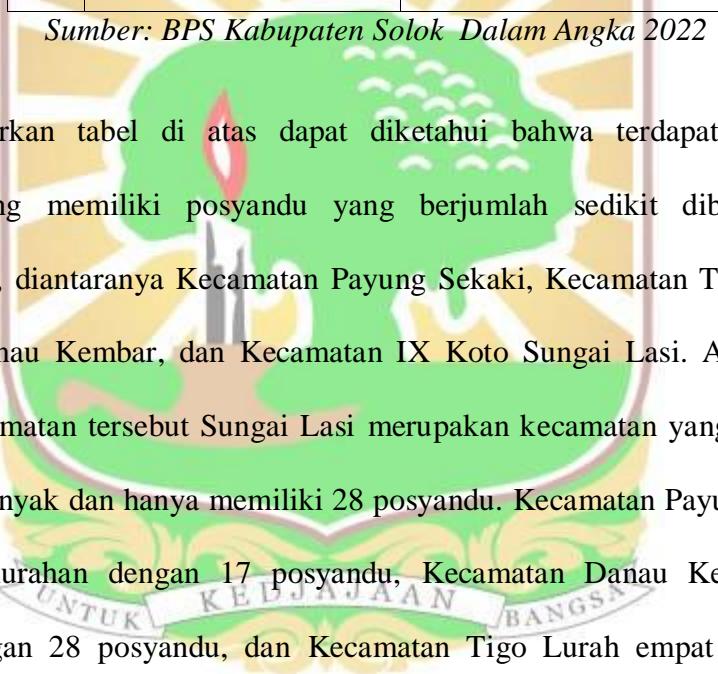
Jumlah Posyandu di Kecamatan IX Koto Sungai Lasi masih sangat sedikit dibandingkan dengan kecamatan lain di Kabupaten Solok yaitu 28 posyandu yang tersebar di beberapa wilayah yaitu, Guguak Sarai 4 posyandu, Koto Laweh 2 posyandu, Indudur 2 posyandu, Sungai Jambur 3 posyandu, Pianggo 4 posyandu, Taruang-Taruang 4 posyandu, Bukit Bais 3 posyandu, Sungai Durian 3 posyandu, dan Siaro-Aro 3 posyandu. Selanjutnya pengetahuan masyarakat masih kurang terkait pentingnya 1000 Hari Pertama Kehidupan, pengaruh pola asuh yang kurang baik pada balita, dan juga pengaruh sarana sanitasi di lingkungan tempat tinggal anak penderita stunting. Berikut data terkait jumlah posyandu pada setiap kecamatan di Kabupaten Solok pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1. 4 Jumlah Posyandu di Setiap Kecamatan Kabupaten Solok**

No	Kecamatan	Jumlah Posyandu
1	Pantai Cermin	40
2.	Lembah Gumanti	72
3.	Hilir Gumati	31
4.	Payung sekaki	17
5.	Tigo Lurah	23
6.	Lembang Jaya	48
7.	Danau Kembar	28

8.	Gunung Talang	70
9.	Bukit Sundi	40
10.	IX Koto Sungai Lasi	28
11.	Kubung	73
12.	X Koto di Atas	53
13.	X Koto Singkarak	57
14.	Junjung Sirih	34

*Sumber: BPS Kabupaten Solok Dalam Angka 2022*



Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat beberapa kecamatan yang memiliki posyandu yang berjumlah sedikit dibandingkan kecamatan lain, diantaranya Kecamatan Payung Sekaki, Kecamatan Tigo Lurah, Kecamatan Danau Kembar, dan Kecamatan IX Koto Sungai Lasi. Akan tetapi diantara 4 kecamatan tersebut Sungai Lasi merupakan kecamatan yang memiliki kelurahan terbanyak dan hanya memiliki 28 posyandu. Kecamatan Payung Sekaki hanya tiga kelurahan dengan 17 posyandu, Kecamatan Danau Kembar dua kelurahan dengan 28 posyandu, dan Kecamatan Tigo Lurah empat kelurahan dengan 23 posyandu. Maka dari itu, kurangnya kesadaran masyarakat datang ke posyandu salah satunya disebabkan oleh keterbatasan jumlah posyandu yang ada di Kecamatan IX Koto Sungai Lasi. Keterbatasan jumlah posyandu dan akses masyarakat untuk membawa anaknya ke posyandu, salah satunya dapat dilihat melalui jumlah imunisasi bayi di Kecamatan IX Koto Sungai Lasi. Berikut data terkait jumlah imunisasi bayi di Kecamatan Sungai Lasi pada gambar di bawah ini:

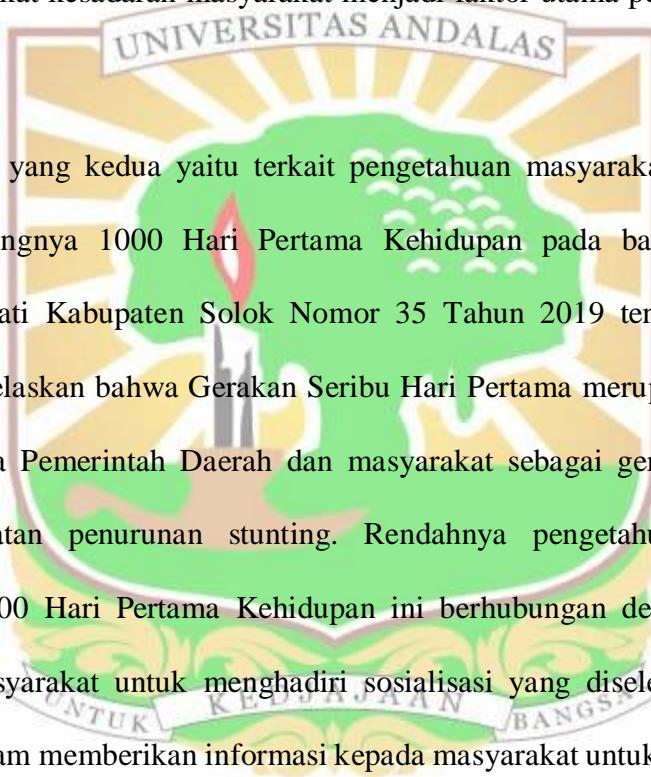
**Tabel 1.5 Jumlah Imunisasi Bayi Menurut Jenis Imunisasi di Kecamatan IX  
Koto Sungai Lasi, 2021-2023**

<b>No</b>	<b>Jenis Imunisasi</b>	<b>Sasaran Bayi</b>			<b>Realisai</b>		
		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
1.	BCG	246	182	203	143	145	133
2.	DPT- 1/HB 1	246	182	203	141	139	130
3.	DPT-2/HB II	246	182	203	127	124	123
4.	DPT 3/HB III	246	182	203	119	97	125
5.	POLIO-1	246	182	203	136	147	139
6.	POLIO-2	246	182	203	128	142	131
7.	POLIO-3	246	182	203	106	135	123
8.	POLIO-4	246	182	203	102	122	127
9.	CAMPACK	246	182	203	105	172	128

*Sumber: BPS Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Dalam Angka 2022*

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa hampir 50 persen bayi di Kecamatan Sungai Lasi tidak melakukan imunisasi jenis apapun pada tahun 2021. Pada tahun 2022 lebih dari 50 persen bayi melakukan imunisasi rutin serta pada tahun 2023 juga mengalami peningkatan yakni hampir 80 persen bayi melakukan

imunisasi. Akan tetapi, pencapaian tersebut masih kurang maksimal karena realisasi imunisasi terhadap bayi belum mencapai 100 persen. Jika dilihat dari tahun 2021 sampai 2023 jumlah bayi yang diimunisasi mengalami peningkatan akan tetapi masih ada sekitar 20-30 persen masyarakat yang memiliki bayi tidak melakukan imunisasi, penemuan data di atas menunjukkan bahwa kesadaran beberapa masyarakat masih rendah untuk membawa bayi nya ke posyandu. Maka dari itu, rendahnya tingkat kesadaran masyarakat menjadi faktor utama penyebab stunting di Sungai Lasi.



Faktor yang kedua yaitu terkait pengetahuan masyarakat masih kurang terhadap pentingnya 1000 Hari Pertama Kehidupan pada bayi. Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Solok Nomor 35 Tahun 2019 tentang Penurunan Stunting menjelaskan bahwa Gerakan Seribu Hari Pertama merupakan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat sebagai gerakan partisipasi untuk percepatan penurunan stunting. Rendahnya pengetahuan masyarakat pentingnya 1000 Hari Pertama Kehidupan ini berhubungan dengan kurangnya partisipasi masyarakat untuk menghadiri sosialisasi yang diselenggarakan oleh puskesmas dalam memberikan informasi kepada masyarakat untuk memperhatikan pemenuhan gizi pada bayi selama 1000 Hari Pertama Kehidupan.

Maka dari itu, untuk menurunkan angka stunting di Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, Puskesmas Sungai Lasi menjalankan berbagai program untuk penanganan stunting diantaranya adalah pertama kelas ibu hamil yang dilaksanakan 4 kali dalam satu tahun. Kelas ibu hamil merupakan kegiatan penyuluhan dalam rangka memberi pengetahuan kepada ibu hamil terkait kehamilan, persalinan, nifas,

keluarga berencana (KB), dll. Berikut dokumentasi pelaksanaan kelas ibu hamil pada gambar di bawah ini:

**Gambar 1. 2 Program Kelas Ibu Hamil**

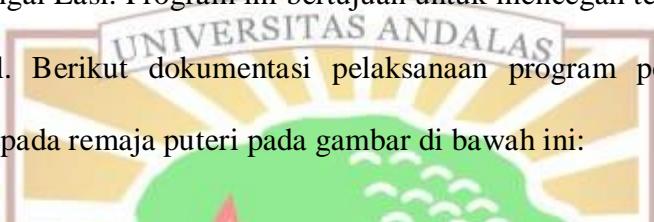


*Sumber: Olahan Peneliti, 2024*

Gambar di atas merupakan dokumentasi kelas ibu hamil yang dilaksanakan empat kali dalam satu tahun. Kelas ibu hamil ini bertujuan untuk persiapan dan pencegahan terhadap resiko kesehatan pada saat hamil dan melahirkan sehingga mengurangi terjadinya kematian ibu dan anak. Pada kelas ibu hamil juga diberikan penyuluhan dan bimbingan mengenai kesehatan pada ibu hamil dan gizi yang baik untuk ibu hamil, serta cara menjaga *personal hygiene* saat hamil dalam rangka meminimalisir terjadinya stunting pada anak.

Kedua, kelas ibu balita yang dilaksanakan dua kali dalam satu tahun. Kelas ibu balita merupakan kegiatan yang ditujukan kepada para ibu yang memiliki anak berusia 0 sampai 5 tahun untuk berdiskusi, bertukar pendapat, dan berbagi pengalaman terkait kesehatan, gizi, dan perkembangan anak. Ketiga, pemberian tablet tambah darah kepada ibu hamil. Setiap ibu hamil diwajibkan untuk

mengkonsumsi tablet tambah darah. Pemberian tablet tambah darah kepada ibu hamil dilakukan pada setiap kontrol kehamilan. Akan tetapi tidak semua ibu hamil yang rutin melakukan kontrol sehingga pemberian tablet tambah darah kepada ibu hamil ini kurang maksimal. Keempat pemberian tablet tambah darah kepada remaja putri, dalam rangka meminimalisir tingginya angka stunting, Puskesmas Sungai Lasi menjalankan program pemberian tablet tambah darah kepada remaja puteri di Kecamatan Sungai Lasi. Program ini bertujuan untuk mencegah terjadinya anemia sebelum hamil. Berikut dokumentasi pelaksanaan program pemberian tablet tambah darah kepada remaja puteri pada gambar di bawah ini:

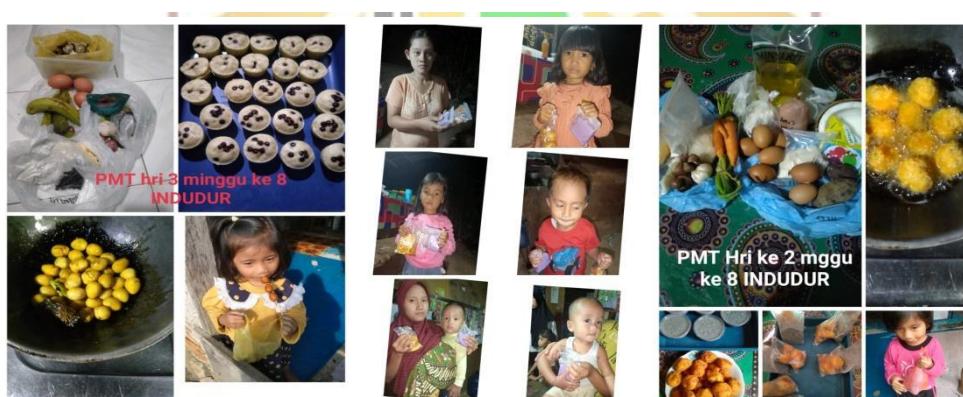
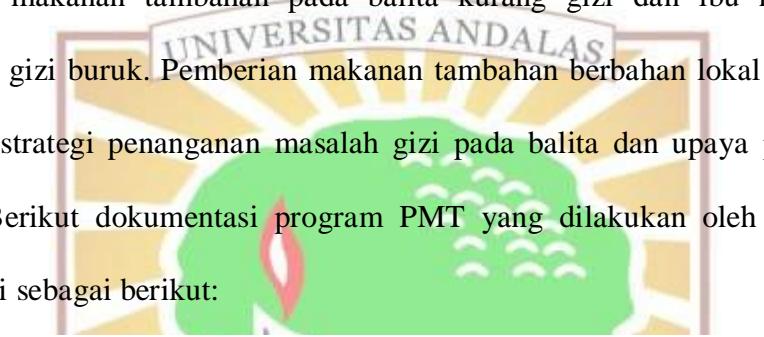


**Gambar 1. 3 Program Pemberian Tablet Tambah Darah Kepada Remaja**



Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa pihak puskesmas sedang melakukan program pemberian tablet tambah darah kepada siswa sekolah menengah atas. Program ini dilaksanakan sekali dalam seminggu, pihak puskesmas setiap minggu melakukan kunjungan ke setiap sekolah menengah atas untuk memberikan tablet tambah darah kepada remaja putri.

Kelima imunisasi dasar pada balita, program ini berupa pemberian vaksin kepada balita untuk melindungi dari penyakit tertentu. Adapun jenis imunisasi dasar yang diberikan oleh Puskesmas Sungai Lasi kepada balita diantaranya, Polio, Hepatitis B, dan BCG. Akan tetapi dalam pelaksanaan program ini masih terdapat masyarakat yang enggan untuk membawa anaknya imunisasi. Merujuk pada tabel 1.3 target imunisasi bayi lebih sedikit dibandingkan target sasarannya. Keenam, pemberian makanan tambahan pada balita kurang gizi dan ibu hamil yang mengalami gizi buruk. Pemberian makanan tambahan berbahan lokal merupakan salah satu strategi penanganan masalah gizi pada balita dan upaya pencegahan stunting. Berikut dokumentasi program PMT yang dilakukan oleh Puskesmas Sungai Lasi sebagai berikut:

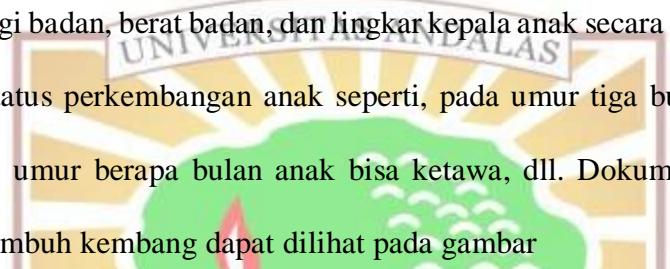


*Sumber: Dokumentasi Puskesmas Sungai Lasi*

Pada gambar di atas, dapat dilihat jenis makanan tambahan yang diberikan oleh pihak puskesmas kepada masyarakat yang berhak mendapatkan program pemberian makanan tambahan (PMT). Kegiatan ini tidak hanya pemberian makanan, tetapi disertai dengan edukasi, penyuluhan, konseling gizi, dan kesehatan

untuk mempercepat proses perubahan perilaku ibu dan keluarga dalam pemberian makan yang tepat sesuai dengan umur, penyiapan makanan, dan pemilihan bahan makanan.

Ketujuh, pemantauan tumbuh kembang di posyandu. Kegiatan pemantauan tumbuh kembang di posyandu ini bertujuan untuk mendeteksi dini penyimpangan pertumbuhan dan perkembangan anak. Adapun bentuk pemantauan nya adalah, mengukur tinggi badan, berat badan, dan lingkar kepala anak secara berkala. Kedua, menentukan status perkembangan anak seperti, pada umur tiga bulan sudah bisa angkat kepala, umur berapa bulan anak bisa ketawa, dll. Dokumentasi program pemantauan tumbuh kembang dapat dilihat pada gambar



**Gambar 1. 5 Program Pemantauan Tumbuh Kembang**



*Sumber: Dokumentasi Puskesmas Sungai Lasi*

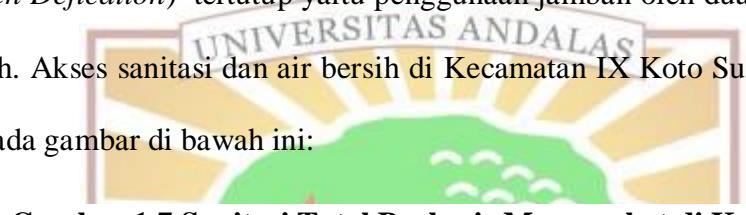
Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat program pemantauan tumbuh kembang yang dilakukan oleh pihak Puskesmas Sungai Lasi. Kegiatan ini dilakukan rutin pada minggu kedua setiap bulannya. Melalui program ini masyarakat dapat mengetahui perkembangan anaknya apakah normal atau

mengalami masalah. Kedelapan, pemberian vitamin A dan obat cacing. Program ini dilaksanakan dua kali dalam setahun. Adapun sasaran dari program ini adalah bayi yang berusia 6 sampai 11 bulan dan balita yang berusia 1 sampai 5 tahun. Sedangkan pemberian obat cacing juga dilakukan dua kali dalam setahun yakni februari dan agustus. Pemberian obat cacing ditujukan kepada anak usia 1-12 tahun. Dokumentasi program pemberian vitamin A dan obat cacing dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

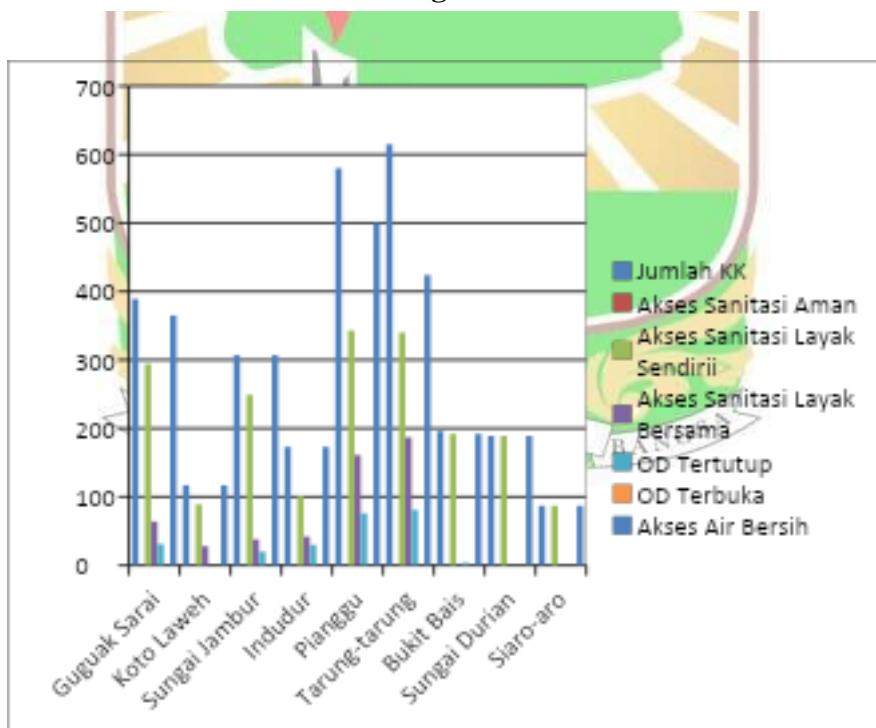


Kesembilan pelaksanaan pemicu sanitasi total berbasis masyarakat. Sanitasi total berbasis masyarakat ini merupakan program dari kemenkes berupa pendekatan yang dilakukan ke masyarakat untuk perubahan perilaku *hygiene* dan sanitasi dengan metode pemicuan. Tujuan program ini untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, meningkatkan personal *hygiene*, menurunkan angka penyakit menular, mewujudkan desa stop buang air besar sembarang, dan

mewujudkan desa sanitasi total berbasis masyarakat. Berdasarkan data yang didapatkan oleh peneliti masyarakat di Kecamatan Sungai Lasi secara keseluruhan sudah menerapkan sanitasi dengan baik. Hal tersebut juga disampaikan oleh koordinator bidang sanitasi bahwa semua nagari di Kecamatan Sungai Lasi sudah ODF (*Open Defecation Free*) Artinya kondisi dimana masyarakat tidak buang air besar di sembarang tempat. Akan tetapi masih terdapat beberapa masyarakat yang OD (*Open Defecation*) tertutup yaitu penggunaan jamban oleh dua kartu keluarga atau lebih. Akses sanitasi dan air bersih di Kecamatan IX Koto Sungai Lasi dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



**Gambar 1.7 Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Kecamatan Sungai Lasi**



*Sumber: UPT Puskesmas Sungai Lasi, 2024*

Berdasarkan diagram di atas dan penjelasan sebelumnya bahwa sanitasi dan ketersediaan air bersih di Kecamatan IX Koto Sungai Lasi sudah baik. Setiap

keluarga hampir memiliki akses sanitasi layak sendiri, akan tetapi masih terdapat beberapa keluarga belum memiliki akses sanitasi layak sendiri sehingga masih menggunakan akses sanitasi layak bersama. Serta sebagian kecil masyarakat masih ada yang melakukan *open defecation* tertutup. Adapun nagari yang sanitasi nya masih bermasalah adalah Sungai Jambur, Guguak Sarai, Koto Laweh, Pianggu, dan Taruang-Taruang. Sedangkan untuk akses air bersih sudah merata didapatkan oleh semua masyarakat di Kecamatan Sungai Lasi. Meskipun sudah tergolong baik, akan tetapi masih dibutuhkan berbagai upaya agar setiap keluarga memiliki sanitasi layak sendiri hal tersebut sesuai dengan Peraturan Bupati Solok Nomor 17 Tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan Stunting pasal 20 menjelaskan bahwa perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kesehatan memiliki peran penting untuk meningkatkan nagari stop buang air besar sembarang dan melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat.

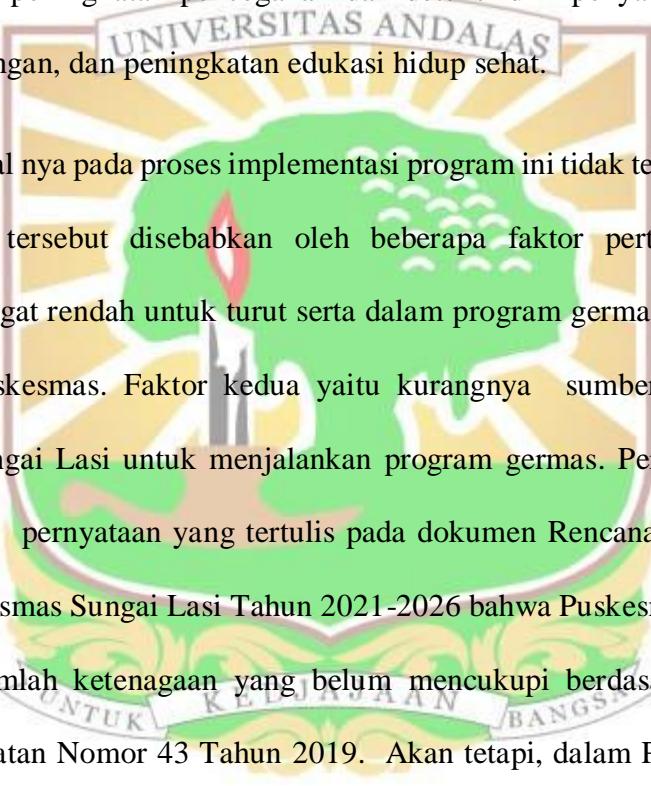
Kesepuluh program germas (gerakan masyarakat sehat). Kegiatan dari germas ini berupa senam dan penyuluhan. Kegiatan germas ini dilakukan satu kali sebulan untuk kegiatan penyuluhan dan satu kali dua minggu untuk kegiatan senam. Berikut dokumentasi kegiatan germas yang dilakukan oleh pihak puskesmas dan masyarakat Sungai Lasi pada gambar di bawah ini:

**Gambar 1. 8 Program Gerakan Masyarakat Sehat (Germas)**



*Sumber: Dokumentasi Puskesmas Sungai Lasi*

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat kegiatan germas yang dilakukan yakni senam dan penyuluhan tentang perilaku hidup sehat kepada masyarakat. Sedangkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Solok Nomor 35 Tahun 2019 tentang Penurunan Stunting disampaikan bahwa gerakan masyarakat hidup sehat dapat dilaksanakan melalui beberapa kegiatan diantaranya: peningkatan aktivitas fisik, peningkatan perilaku hidup sehat, penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi, peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit, peningkatan kualitas lingkungan, dan peningkatan edukasi hidup sehat.



Sama hal nya pada proses implementasi program ini tidak terlaksana dengan maksimal hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor pertama partisipasi masyarakat sangat rendah untuk turut serta dalam program germas yang diadakan oleh pihak puskesmas. Faktor kedua yaitu kurangnya sumber daya manusia Puskesmas Sungai Lasi untuk menjalankan program germas. Pernyataan diatas relevan dengan pernyataan yang tertulis pada dokumen Rencana Strategis Lima Tahunan Puskesmas Sungai Lasi Tahun 2021-2026 bahwa Puskesmas Sungai Lasi mempunyai jumlah ketenagaan yang belum mencukupi berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019. Akan tetapi, dalam Peraturan Bupati Kabupaten Solok Nomor 35 Tahun 2019 Pasal 11 ayat 4 disebutkan bahwa program gerakan masyarakat hidup sehat dikampanyekan oleh perangkat daerah.

Berdasarkan pemaparan fenomena diatas peneliti tertarik untuk melihat bagaimana efektivitas penanganan stunting di Kecamatan IX Koto Sungai Lasi yang akan dielaborasi dengan teori Efektivitas Oleh Campbell . Menurut Campbell efektivitas secara komprehensif adalah tingkat kemampuan suatu lembaga atau

organisasi untuk dapat melaksanakan semua tugas pokoknya atau untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Sehingga efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>10</sup>

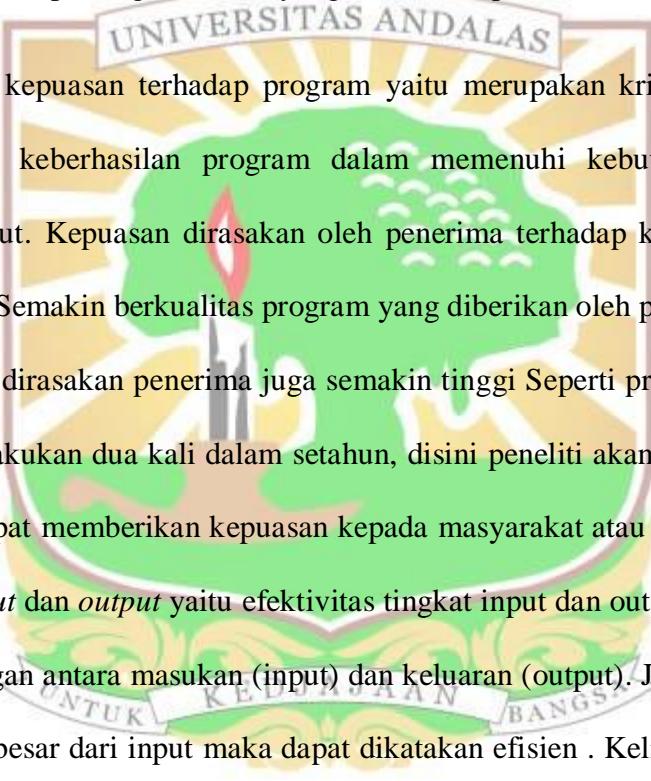
Ada lima variabel teori pada teori efektivitas menurut Campbell, pertama keberhasilan program dapat dilihat dari tujuan penetapan program dan bagaimana tujuan tersebut dapat dilaksanakan oleh pihak penyelenggara program yaitu Puskesmas IX Koto Sungai Lasi. Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan sebelumnya mengatakan bahwa program penurunan stunting ini telah dilakukan melalui beberapa program seperti program imunisasi, kelas ibu hamil, pemberian makanan bergizi, dan lainnya yang bertujuan untuk menurunkan angka stunting di Kecamatan IX Koto Sungai Lasi.. Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan sebelumnya angka stunting di Kecamatan sudah mengalami penurunan mulai tahun 2021 sampai 2024 akan tetapi, Kecamatan Sungai Lasi ini tetap menjadi daerah penyumbang stunting tertinggi di Kabupaten Solok. Hal tersebut tentunya tidak terlepas dari efektif atau tidaknya upaya penanganan stunting di kecamatan tersebut. Hal tersebut memiliki keterkaitan untuk melihat apakah program tersebut berhasil atau tidak.

Kedua, keberhasilan sasaran merupakan variabel penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu program. Dalam pelaksanaan penanganan

---

<sup>10</sup> Anisah dan Etty Soesilowati, Efektivitas Program Kartu Jakarta Pintar Tingkat Sekolah Menengah Atas Negeri di Kecamatan Pesanggraha, Indonesian Journal of Development Economics, Vol 1 No.1 (2018)

program stunting di Kecamatan IX Koto Sungai Lasi yang akan dilihat adalah ketepatan sasarnya apakah sudah sesuai dengan sasaran yang ditetapkan sebelumnya atau sebaliknya. Adapun sasaran dari pelaksanaan program ini adalah untuk menurunkan angka stunting di Kecamatan IX Koto Sungai Lasi. Setiap program penurunan stunting yang diselenggarakan ditujukan kepada remaja putri, ibu hamil, dan balita untuk berpartisipasi penuh dalam mengikuti program sebagai upaya untuk mencapai target sasaran yang telah ditetapkan.



Ketiga, kepuasan terhadap program yaitu merupakan kriteria efektivitas mengacu pada keberhasilan program dalam memenuhi kebutuhan penerima program tersebut. Kepuasan dirasakan oleh penerima terhadap kualitas program yang diterima. Semakin berkualitas program yang diberikan oleh pemerintah maka kepuasan yang dirasakan penerima juga semakin tinggi Seperti program kelas ibu hamil yang dilakukan dua kali dalam setahun, disini peneliti akan melihat apakah program ini dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat atau tidak. Keempat, kesesuaian *input* dan *output* yaitu efektivitas tingkat input dan output dapat dilihat dari perbandingan antara masukan (*input*) dan keluaran (*output*). Jika output suatu program lebih besar dari input maka dapat dikatakan efisien . Kelima, pencapaian tujuan menyeluruh dapat dilihat dari sejauh mana organisasi melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan. Pada variabel ini peneliti akan mendeskripsikan terkait pencapaian secara keseluruhan Puskesmas IX Koto Sungai Lasi dalam menjalankan berbagai program penurunan stunting serta berbagai faktor yang mempengaruhinya.

Berdasarkan pemaparan fenomena di atas, teori efektivitas menurut Campbell memiliki keterkaitan dengan fenomena yang ditemukan oleh peneliti. Setiap variabel pada teori ini mampu mengelaborasi fenomena tentang efektivitas penanganan stunting di Kecamatan IX Koto Sungai Lasi. Sehingga peneliti menggunakan teori efektivitas Sutrisno ini untuk menganalisis lebih dalam fenomena penelitian.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan masalah pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana efektivitas penanganan stunting di Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok.

## 1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan efektivitas penanganan stunting di Kecamatan IX Koto Sungai Lasi.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan tersebut, maka penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

### 1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Hasil Penelitian diharapkan dapat memberikan informasi kepada seluruh pembaca terkait Efektivitas Penanganan Stunting di Kecamatan IX Koto Sungai Lasi di Kabupaten Solok. Data dan informasi dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian tentang Penanganan Stunting di Kabupaten Solok.

### 1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi perguruan tinggi di program studi Administrasi Publik, hasil penelitian ini dapat memperkaya wawasan ilmiah dan kepustakaan di Universitas Andalas dan bisa dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya terkhusus untuk program studi Administrasi Publik.
2. Bagi penulis, untuk menambah ilmu pengetahuan dan mengembangkan wawasan mengenai Ilmu Administrasi Publik khususnya konsentrasi Manajemen Publik terutama tentang efektivitas penanganan stunting di Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok.
3. Bagi pihak lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak Puskesmas Sungai Lasi dalam memperoleh informasi mengenai efektivitas penanganan stunting yang telah mereka jalankan. Sedangkan bagi masyarakat dapat mengetahui dan memperoleh informasi tentang efektivitas penanganan stunting di Kecamatan IX Koto Sungai Lasi.